



LAPORAN RESES
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023
10 - 17 Mei 2023

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
SENIN, 12 JUNI 2023

Dibacakan Oleh:
H. SETIA BUDI WIBOWO, S.Ag, M.M.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yang Kami Hormati Gubernur Jawa Tengah,

Yang Kami Hormati Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah,

Yang Kami Hormati Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah,

Yang Kami Hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah; Jajaran Eksekutif, Wartawan, Mahasiswa, segenap tamu undangan serta hadirin yang berbahagia.

Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga pada kesempatan ini, kita dapat hadir dalam acara sidang paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat menjalankan tugas - tugas yang telah diamanahkan kepada kita.

Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Reses Masa Persidangan III tahun 2023 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah kami laksanakan pada tanggal 15 s.d 17 dan 19 s.d 23 februari 2023 berlokasi di daerah pemilihan se-Jawa Tengah.

Hadirin yang kami hormati,

Dalam Reses Tahun Sidang 2023 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan agenda Reses di 10 daerah pemilihan:

1. Kota Semarang oleh Saudara H. Agung Budi Margono, S.T, M.T

2. Kabupaten Kendal, Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang oleh Saudari Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd
3. Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak dilaksanakan oleh Saudara H. Setia Budi Wibowo, S.Ag, M.M
4. Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen oleh Saudara H. Hadi Santoso, S.T, M.Si
5. Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta oleh Saudara Dipl.-Ing. H. Quatly Abdulkadir Alkatiri.
6. Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang oleh Saudara H. Arifin Mustofa, S.Pd.
7. Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga oleh Saudara H. Tri Mulyantoro, S.H
8. Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap oleh Saudara Jasiman, Lc
9. Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal oleh Saudara H. Sururul Fuad, Lc, M.E.I
10. Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan oleh saudara H. Riyono, S.Kel, M.Si

Hadirin Yang Kami Hormati

Adapun aspirasi, masukan, saran temuan selama kegiatan reses secara khusus di antaranya sebagai berikut :

1. Terbakarnya Pasar Purwareja Klampok pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, mengakibatkan kerugian para pedagang yang mencapai miliaran rupiah. Kewenangan untuk merelokasi pasar adalah kewenangan Pemerinah Daerah Kabupaten setempat termasuk melakukan pendataan kerugian, dan secepatnya melakukan penyelidikan

penyebab kebakaran dahsyat tersebut. Namun demikian Pedagang yang mengalami kerugian dan membutuhkan akses permodalan untuk kembali bisa berdagang diharapkan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pendampingan pedagang kecil dan menengah.

2. Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) di wilayah pesisir utara Jawa Tengah menolak ekspor pasir laut karena akan merusak alam dan merugikan nelayan. Aliansi Nelayan tersebut juga heran mengapa ekspor pasir diperbolehkan padahal sudah 20 tahun dilarang. Penolakan Aliansi Nelayan itu ditujukan pada pemerintah yang menerbitkan PP 26 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Setidaknya ada 10 ancaman penambangan pasir laut jika dilakukan :

- 1) akan meningkatkan abrasi pesisir pantai dan erosi pantai.
- 2) menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai.
- 3) Semakin meningkatnya pencemaran pantai.
- 4) penurunan kualitas air laut yang menyebabkan semakin keruhnya air laut.
- 5) Rusaknya wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan.
- 6) menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan laut
- 7) meningkatkan intensitas banjir air rob, terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut.
- 8) merusak ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut.
- 9) semakin tingginya energi gelombang atau ombak yang menerjang pesisir pantai atau laut. Hal ini dikarenakan dasar

perairan yang sebelumnya terdapat kandungan pasir laut menjadi sangat curam dan dalam. Sehingga hempasan energi ombak yang menuju ke bibir pantai akan menjadi lebih tinggi karena berkurangnya peredaman oleh dasar perairan pantai.

- 10) timbulnya konflik sosial antara masyarakat nelayan dan para penambang pasir laut.

Dari sepuluh dampak tersebut, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan antisipasi dengan tidak memberikan rekomendasi izin penambangan pasir laut di Wilayah pesisir Pantai Utara Jawa Tengah (Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010, kewenangan Gubernur untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil)

3. Dampak genangan banjir rob di kecamatan sayung dan kecamatan wedung mengakibatkan lahan pemukiman warga tergenang. Selain pemukiman warga tergenang, ruas jalan nasional Pantura Sayungpun tergenang dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. mengakibatkan Perekonomian dan aktivitas masyarakat terganggu. Masyarakat mengharap Pemprov Jateng dan pusat segera mengambil langkah langkah nyata. Normalisasi Sungai Dombo dan Sungai Babon (Sayung). Normalisasi Sungai Tuntang Lama (Purworejo Bonang) serta perlunya menghentikan reklamasi pantai di Kota Semarang.

4. Laporan dan pengaduan masyarakat mengenai kelangkaan pupuk pupuk Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Brebes menyebutkan bahwa dalam masa-masa kegiatan bercocok tanam

mereka justru kesulitan mendapatkan pupuk. Di Desa tersebut, pupuk langka dan walaupun ada harganya mahal. Pemerintah harus memperketat pengawasan distribusi pupuk agar pupuk yang diterima petani harganya tidak melebihi HET. jika ada pihak-pihak yang mempermainkan harga maka pemerintah harus menindaknya. keseriusan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah seperti ini menjadi cerminan bagaimana prioritas kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Apalagi sektor pertanian menjadi mata pencaharian terbanyak masyarakat dan harus didukung kemajuannya

5. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi di wilayah perkotaan sebagaimana disebutkan pada data BPS tahun 2023. Terkait dengan kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jateng secara umum turun dari 5,95 di th 2021 menjadi 5,57 di th 2022, atau turun sebesar 0,38%. **Beberapa Daerah terutama Kota, masih memiliki angka TPT yang jauh lebih tinggi dibanding TPT Provinsi Jateng, meskipun pada tahun 2022 telah berhasil turun** dibanding tahun 2021. Daerah yang dimaksud, yaitu :

- 1) Kota Semarang dari 9,54 th 2021 menjadi 7,60 th 2022
- 2) Kota Magelang, dari 8,73 th 2021 menjadi 6,71 th 2022
- 3) Kota Tegal, dari 8,25 th 2021 menjadi 6,68 th 2022
- 4) Kota Surakarta, dari 7,85 th 2021 menjadi 5,83 th 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa Pengangguran Terbuka di wilayah perkotaan persentasenya masih cukup besar (walaupun tahun 2022 telah turun). Aspirasi warga Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Tegal dan Kota Surakarta berharap agar Program

pengembangan startup wirausaha baru, serta pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memprioritaskan penduduk di Kota - Kota tersebut atau menambah jangkauan program agar penerima manfaat jauh lebih banyak terutama diwilayah perkotaan.

Demikianlah beberapa hal yang menjadi masukan, temuan selama masa Reses anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami harap Saudara Gubernur bisa memperhatikan serta menindaklanjutinya. Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum warohmatullah wabarokatuh

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

ttd

ttd

**H. AGUNG BUDI MARGONO, S.T, M.T
KETUA**

**H. RIYONO, S.Kel, M.Si
SEKRETARIS**